

FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2010-2018

Andi Apriyanto¹, I Gusti Ketut Agung Ulupui², Ety Gurendrawati³
Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
e-mail: andiapriyanto2504@gmail.com

ABSTRACT

Flypaper Effect on Local Revenue and General Allocation Funds on Regional Expenditures in Regencies / Cities in Bali Province in 2010-2018. This research aims to examine the effect of Local Revenue and General Allocation Fund on Regional Expenditures and to find out whether there has been a Flypaper Effect phenomenon on Local Revenue and General Allocation Fund on Regional Expenditures. In the research used secondary data, namely the Budget Realization Report of the Regional Budget in the Regency/City of the Province of Bali which was contained in the Ministry of Finance's DJPK 2010-2018. The sampling technique used purposive sampling method and 9 samples of districts / cities were selected with a total of 81 observations. Testing used multiple linear regression analysis with SPSS 24 software test tool. The results of the research obtained indicate: (a) local revenue has a positive effect on regional expenditures (b) general allocation funds have a positive effect on regional expenditures (c) there is no flypaper effect phenomenon on local revenue and general allocation funds on regional expenditures.

Keywords: *Flypaper Effect, Local Revenue, General Allocation Funds, Regional Expenditures*

ABSTRAK

*Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2018. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah dan mengetahui apakah telah terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah. Pada penelitian data menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran APBD di Kabupaten/Kota Provinsi Bali yang terdapat di DJPK Kemenkeu tahun 2010-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan terpilih 9 sampel Kabupaten/Kota dengan total observasi sebanyak 81. Pengujian dilakukan melalui uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan alat uji software SPSS 24. Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan: (a) pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah (b) dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah (c) tidak terjadinya fenomena *flypaper effect* pada pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah.*

Kata Kunci: *Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah*

PENDAHULUAN

Salah satu agenda reformasi yang dicita-citakan untuk dicapai adalah pemberian otonomi daerah. Otonomi daerah dimaksudkan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyerahan wewenang ini lazim disebut dengan desentralisasi. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.

Salah satu masalah pemerintah yang dihadapi dalam perbelanjaan daerah adalah ketidaktersediaannya sumber dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerahnya jika dibandingkan kebutuhan suatu daerah. Sehingga tujuan dari pemerintahan yang terdesentralisasi tidak dapat tercapai. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih". Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila belanja daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digambarkan dengan tingkat kemandirian daerah yang tinggi atau daerah telah memaksimalkan pendapatan asli daerah yang dimiliki sehingga daerah tersebut telah menggunakan sumber-sumber daya pada daerah yang dimiliki untuk pembangunan daerahnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber keuangan daerah yang didapat dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Ida Mentayani (2012) PAD idealnya merupakan sumber-sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di luar pengendalian kewenangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dengan tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi dan netralitas. Apabila daerah tersebut memiliki PAD yang rendah maka pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan transfer dana dari pemerintah pusat untuk kegiatan pembangunan di daerahnya yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU).

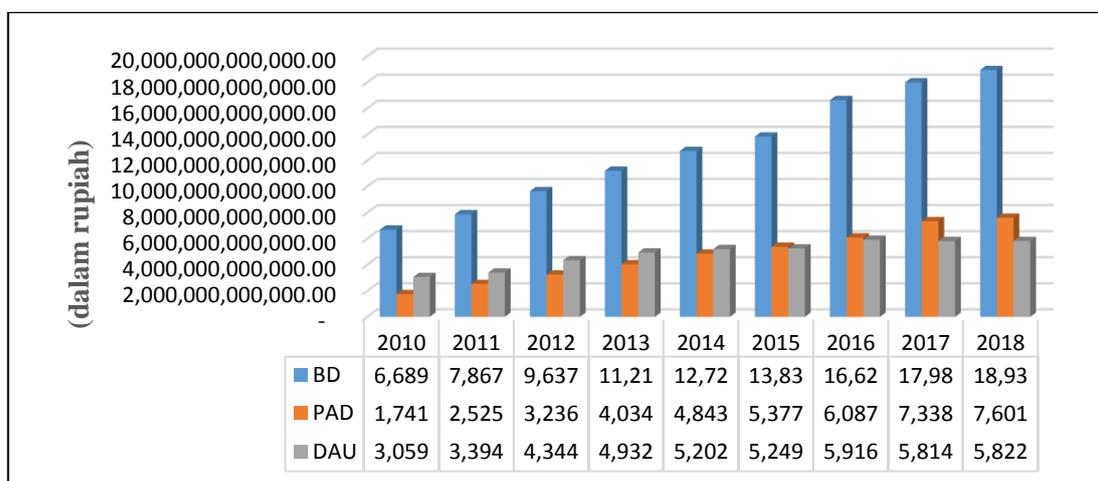
Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, dengan demikian Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, termasuk mandiri dalam masalah keuangan. Meskipun demikian Pemerintah Pusat tetap memberi bantuan berupa Dana Alokasi Umum sebagaimana yang tercantum pada UU No. 32 tahun 2004. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana perimbangan yang dimana merupakan dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah setiap daerah otonom sebagai dana pembangunan. DAU sendiri bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang berguna untuk mengurangi ketimpangan keuangan daerah berdasarkan pertimbangan potensi daerah dan kebutuhan daerah. Penyusunan DAU harus digunakan secara efektif dan efisien karena jika tidak akan menimbulkan masalah pada keuangan daerah dimana DAU bersifat dinamis atau tidak pasti. Menurut (Sugawa Korry, 2017), jika dalam pencapaian APBN tidak tercapai, DAU pasti akan berkurang yang mana berkurangnya DAU akan menimbulkan konsekuensi yang menimbulkan akan adanya program daerah yang dikurangi.

Besarnya kebutuhan belanja daerah yang semakin meningkat tidak memungkinkan beberapa pemerintah provinsi atau Kabupaten/Kota untuk hanya mengandalkan PAD semata. Pada akhirnya dana transfer berupa DAU akan digunakan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah. Selain itu, masalah yang terjadi di akhir-akhir ini di beberapa provinsi di Indonesia adalah pemerintah daerah

juga biasanya memanipulasi anggaran yang tidak wajar yang tidak sesuai dengan kebutuhannya yaitu dengan cara menaikkan jumlah pengeluaran belanja daerah yang setinggi-tingginya agar bisa mendapatkan bantuan dana anggaran dari pemerintah pusat yang berupa DAU. Fenomena ini disebut dengan fenomena *flypaper effect*. Menurut Ishak (2019) *Flypaper Effect* adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau *Unconditional grants* (DAU) daripada pendapatan asli dari daerah (PAD) tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah. Oates (1999) dalam Halim (2002) menyatakan bahwa beberapa penelitian mengenai perilaku Pemerintah Daerah dalam merespon transfer Pemerintah Pusat yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa respon Pemerintah Daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya. Ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibandingkan pendapatan daerahnya sendiri maka disebut *flypaper effect*.

Flypaper effect bertujuan untuk mengetahui apakah dalam keuangan daerah yang dimiliki telah terjadi penyelewengan dana transfer dari pemerintah pusat atau tidak dimana *flypaper effect* sendiri terjadi jika koefisien beta DAU lebih besar dari koefisien beta PAD atau PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Jika terjadi *flypaper effect* maka suatu daerah tersebut dapat terindikasi bahwa pemerintah daerah dalam menggunakan belanja masih bergantung dari transfer pemerintah pusat. Sebaliknya jika tidak terjadi *flypaper effect* maka daerah tersebut mampu menggunakan belanja daerah secara mandiri dimana PAD daerah tersebut sangat besar dibandingkan jumlah DAU. Dari penelitian Kusumadewi dan Rahman (2007), mengatakan bahwa *flypaper effect* tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tertinggi. Dalam kebijakan daerah pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan DAU secara efektif dan efisien. *Flypaper effect* juga sebagai alat analisis dimana dapat menunjukkan apakah pemerintah daerah dapat menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat secara efektif dan efisien.

Kegiatan perekonomian di Bali banyak terpengaruh oleh kegiatan perekonomian di pulau Jawa, terutama Jawa Timur. Orientasi perekonomian mengarah ke Surabaya. Sektor-sektor yang menonjol di dalam kegiatan ekonomi ialah sektor pertanian dan sektor pariwisata. Arah pembangunan Bali di bidang ekonomi saat ini yaitu pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat. Karena selama ini ekonomi kerakyatan Bali mempunyai dampak besar dalam menggerakkan ekonomi tingkat bawah yang ditunjang dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang memadai. Namun, sektor pertanian yang menjadi utama dari perekonomian di Bali, justru mengalami penurunan. Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Bali menunjukkan bahwa sumbangan sektor pertanian terlihat terus menurun. Sekurangnya sejak 2010, yang ketika itu tercatat 17,2%. Sudah kurang 20% sumbangan sektor pertanian pada tahun itu dan sudah kurang mencerminkan Bali sebagai daerah agraris. Kemudian, sumbangan itu terus mengalami penurunan hampir secara konsisten setiap tahun. Menyisakan 13,8% pada PDRB Bali 2018 yang diumumkan 2019 lalu. Sudah kurang dari sepertujuh sumbangannya.



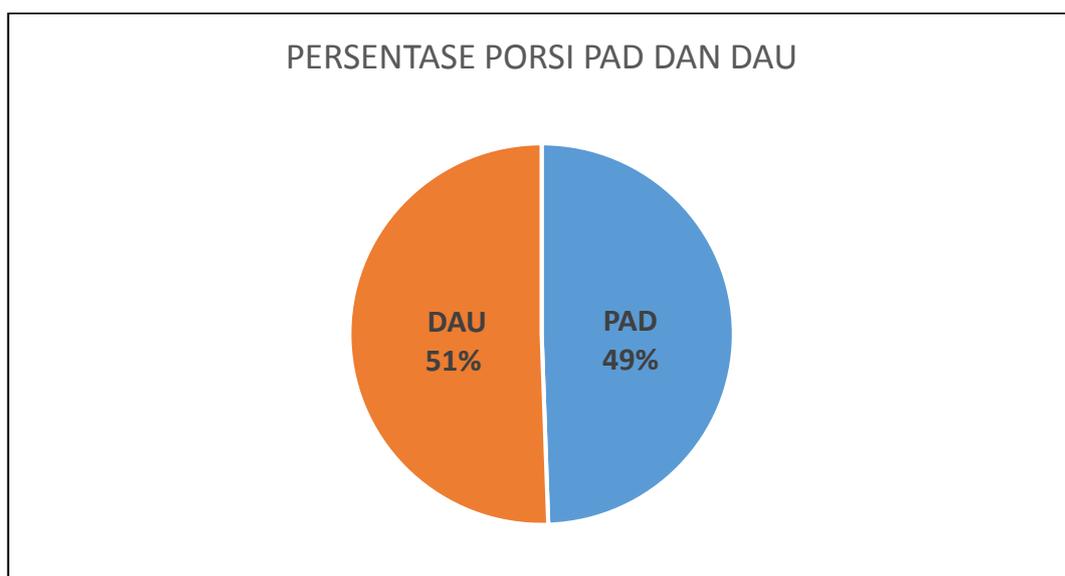
Sumber: diolah penulis 2020

Gambar 1. Ringkasan PAD, DAU, Belanja Daerah di Provinsi Bali pada Tahun 2010-2018

Dari Gambar 2 menunjukkan bahwa belanja daerah terus mengalami peningkatan seiring dengan PAD dan DAU yang juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2010-2018 jumlah DAU mengalami peningkatan dan penurunan dimana DAU pada tahun 2010 memiliki jumlah total Rp. 3,059 triliun, tahun 2011 memiliki jumlah Rp. 3,394 triliun, tahun 2012 memiliki jumlah Rp. 4,344 triliun, tahun 2013 memiliki jumlah Rp. 4,932 triliun, tahun 2014 memiliki jumlah sebesar Rp. 5,202 triliun, tahun 2015 sebesar Rp. 5,249 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 5,916 triliun, dan menurun pada tahun 2017 sebesar Rp. 5,814 triliun, lalu mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 5,822 triliun. Sedangkan untuk PAD dari tahun 2010-2018 selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,74 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 2,525 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 3,236 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 4,034 triliun, tahun 2014 sebesar Rp. 4,843 triliun, tahun 2015 sebesar 5,377 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 6,087 triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 7,338 triliun dan tahun 2018 sebesar Rp. 7,601 triliun.

Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2014 jumlah DAU memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai PAD yang artinya pemerintah belum secara mandiri menggunakan PAD yang dimiliki. Jumlah nilai DAU yang mengalami peningkatan dari tahun 2010-2018 artinya pemerintah daerah sangat bergantung pada DAU untuk memenuhi kegiatan belanjanya atau dengan kata lain semakin meningkatnya DAU maka pemerintah daerah semakin meningkat dalam menggunakan Belanja Daerahnya untuk kebutuhan pembangunan daerahnya. Dan pada tahun 2015-2018 jumlah PAD memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai DAU yang berarti sudah secara mandiri menggunakan PAD. Nilai DAU pada tahun 2010-2014 lebih besar dari PAD karena Pemerintah Daerah berupaya untuk mengembangkan daerahnya dengan melakukan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan nilai PAD dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan PAD yang selalu meningkat pada tahun 2010-2018 mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya PAD maka akan semakin meningkat pula Belanja Daerah.

Pada Gambar I adalah ringkasan PAD, DAU, dan Belanja Daerah di Provinsi Bali selama tahun 2010-2018 yang menunjukkan jumlah besaran PAD, DAU, Belanja Daerah pada Provinsi Bali. Lalu dari Gambar I tersebut, peneliti menjumlahkan PAD dan DAU tahun 2010-2018 yang ditunjukkan dengan hasil persentase porsi dari PAD dan DAU untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam menggunakan Belanja Daerahnya sebagian besar menggunakan dari nilai PAD atau DAU. Berikut adalah Gambar 2 yaitu persentase porsi dari PAD dan DAU:



sumber: diolah penulis 2020

Gambar 2. Persentase Porsi PAD dan DAU di Provinsi Bali pada Tahun 2010-2018

Pada Gambar 2, persentase dari porsi PAD dan DAU di Provinsi Bali tahun 2010-2018 menunjukkan bahwa DAU sebesar 51% memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai PAD yaitu sebesar 49%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengandalkan DAU untuk membelanjakan Belanja Daerahnya dibandingkan PAD atau dengan kata lain belum secara mandiri

daerah tersebut untuk menggunakan PAD dalam memenuhi kebutuhan yang dimiliki dari daerahnya. Selain itu dengan hasil tersebut dapat mengindikasikan terjadinya fenomena *flypaper effect* dimana jumlah nilai DAU lebih besar dari jumlah nilai PAD terhadap Belanja Daerah. Lebih lanjutnya untuk mengetahui apakah terjadi *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, maka peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih empirik melalui pengujian data yang akan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan yaitu *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi yang mempengaruhi Belanja Daerah pada pemerintahan telah banyak juga diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi yang mempengaruhi Belanja Daerah pada pemerintahan antara lain; Ernayani (2017) melakukan penelitian yang menguji Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Pada penelitian tersebut diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Susanti Eka Wahyuni dan Indrian Supheni (2017) yang mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien regresi yang didapat bernilai negatif.

Penelitian yang dilakukan Inayati (2017) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rusmita (2016) yang mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Beberapa peneliti sebelumnya telah meneliti mengenai fenomena *flypaper effect* terhadap belanja daerah dimana terdapat hasil penelitian yang berbeda. Hasil penelitian Adiputra (2014) menyimpulkan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Karangasem dimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah tidak lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Sedangkan di penelitian lainnya menunjukkan hasil penelitian yang berbeda, Amalia (2015) membuktikan secara empiris bahwa telah terjadi *flypaper effect* dalam respon Pemerintah Daerah terhadap DAU dan PAD pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Perbedaan hasil penelitian yang terjadi menarik untuk dilakukannya penelitian mengenai fenomena *Flypaper Effect* yang dipengaruhi oleh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah dan diuji kebenarannya. Penelitian ini merupakan pengembangan yang dilakukan dari penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin memberikan bukti empiris mengenai fenomena *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah apakah ada atau tidak fenomena tersebut di Provinsi Bali.

Dari hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan, menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan berbeda-beda. Ketidakkonsistenan hasil penelitian antara peneliti yang satu dengan peneliti lain yang membuat peneliti perlu mengkaji ulang kembali. Hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah-daerah atau provinsi lainnya di Indonesia. Karena tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda baik dari sisi ekonomi maupun letak geografis daerah tersebut. Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi yang potensial di sektor pariwisata dengan penyumbang PAD terbesar. Ini artinya Provinsi Bali diharapkan dapat mampu berinovasi secara mandiri untuk mengembangkan sumber-sumber daya alam yang dimiliki dan melakukan pembangunan yang seharusnya.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah wilayah kabupaten/kota provinsi Bali yang terdapat di DJPK Kementerian Keuangan. Penelitian ini mengenai fenomena *Flypaper Effect* pada pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah sangat jarang dilakukan. Pada penelitian sebelumnya Adiputra (2014) hanya meneliti di salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Karangasem, (Ansori dan Muthmainah, 2018) meneliti di beberapa pulau yaitu pulau Bali dan Nusa Tenggara, (Sukriy dan Halim, 2003) melakukan pengujian mengenai fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah pemerintah kabupaten atau kota di pulau Jawa dan Bali. Sementara itu dalam penelitian ini, meneliti di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Keterbaruan penelitian lainnya yaitu pada tahun atau periode pengamatan, penelitian ini menggunakan periode pengamatan tahun 2010-2018. Pada penelitian sebelumnya, banyak penelitian yang menggunakan periode pengamatan selama 5 tahun. Seperti pada penelitian (Sihombing dan Wijaya, 2016) meneliti dalam periode pengamatan 4 tahun. Lalu adapun penelitian lainnya seperti

(Adiputra, 2014), (Amalia, 2015), (Haryanto, 2019), (Wahyuni dan Supheni, 2017), (Iskandar, 2012), (Adiputra, 2014) yang meneliti pada periode pengamatan 5 tahun. Adapun (Rusmita, 2016) yang memiliki periode pengamatan selama 6 tahun. Sementara itu dalam penelitian ini, menggunakan periode pengamatan 9 tahun, yaitu dari tahun 2010-2018.

TINJAUAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan suatu bentuk kontraktual yang terjadi antara principal–agen. Salah satu aturan yang secara eksplisit merupakan suatu perwujudan dari teori keagenan adalah UU No. 33/2004 yang menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat (sebagai prinsipal) akan mentransfer dana perimbangan, yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Bagi hasil pajak dan bukan pajak kepada Pemerintah Daerah (sebagai agen).

Teori keagenan (*agency theory*) memiliki keterkaitan dalam penelitian ini. Menurut Lane (2003) *agency theory* dapat diterapkan dalam organisasi publik, ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal–agen. Terdapat empat ciri pendelegasian yang dimiliki dalam demokrasi modern yaitu: adanya prinsipal agen, kemungkinan terjadi konflik kepentingan, adanya asimetri informasi, prinsipal kemungkinan dapat mengurangi masalah keuangan (Lupia & McCubbins, 2000)

Belanja Daerah

Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

Klasifikasi belanja daerah Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan dibagi menjadi: belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain/belanja tidak terduga, dan belanja aset lainnya

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian yang sangat berperan penting dalam akuntansi sektor publik selain Dana Alokasi Umum dan Pendapatan lain–lain yang berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika, Pendapatan Asli Daerah meningkat disertai dengan pengeluaran daerah yang efisien, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik pula dalam suatu daerah tertentu. Menurut Abdul Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber–sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut undang–undang No. 33 tahun 2004 pasal 6 dijelaskan bahwa, sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diperoleh dari transfer oleh pemerintah pusat untuk digunakan oleh pemerintah daerah sebagai penunjang kebutuhan daerah tersebut untuk menjalankan pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa,

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Halim (2016) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya DAU adalah sebagai berikut: Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan yang terjadi dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah yaitu dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN.

Flypaper Effect

Flypaper effect adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diprosikan dengan dana alokasi umum daripada menggunakan pendapatan asli daerahnya. Selain itu fenomena *flypaper effect* juga membawa implikasi bahwa transfer akan meningkatkan belanja daerah yang besar dibandingkan penerimaan transfer itu sendiri. Maimunah (2006) menjelaskan bahwa *flypaper effect* adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri.

Ada beberapa indikasi yang menentukan terjadinya *flypaper effect* dimana asumsi penentuan terjadinya *flypaper effect* berfokus pada perbandingan antara pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Terjadinya *flypaper effect* dinyatakan oleh Venter (2007) dan Mole (2002) yaitu:

1. Nilai koefisien beta Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap terhadap Belanja Daerah, dan nilai keduanya signifikan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh/ respon PAD terhadap Belanja Daerah tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*.

Menurut Gorodnichenko (2011) berpendapat bahwa terjadinya *flypaper effect* memiliki dua versi, yaitu;

1. Merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan.
2. Mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah dapat dikaitkan dengan teori keagenan. Dalam konteks hubungan PAD terhadap Belanja Daerah, terdapat kemungkinan terjadinya asimetri informasi yang termasuk merupakan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menginginkan agar pengelolaan PAD dilakukan secara efektif dan efisien yang akan meningkatkan penerimaan PAD dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam melaksanakannya. Akan tetapi, pemerintah daerah kurang mengoptimalkan PAD dan melaporkan PAD yang tidak sesuai kepada pemerintah pusat agar mendapatkan dana tambahan yang meningkatkan pendapatan daerah sebagai dana yang akan dibelanjakan untuk kebutuhan di tahun berikutnya.

Hasil penelitian relevan mengenai pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah menunjukkan adanya pengaruh PAD secara positif terhadap Belanja Daerah. Haryanto (2019) menguji hipotesis mengenai pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah dan memberikan hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Jawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar PAD semakin besar juga Belanja Daerah. Iskandar (2012) melakukan penelitian PAD terhadap Belanja Daerah hasil penelitiannya menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Whayuni dan Supheni (2017) bahwa PAD tidak berpengaruh secara signifikan dan bernilai negatif terhadap Belanja. Sejalan dengan penelitian

yang dilakukan Amalia (2015) yang mengemukakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

H₁ : PAD mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah juga dapat dikaitkan dengan teori keagenan. Dimana pada teori keagenan antara principal dan agen dapat terjadi konflik kepentingan yang mengakibatkan terjadinya asimetri informasi. Pemerintah daerah berperan sebagai perantara pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan publik dengan desentralisasi yang dilakukan dan diharapkan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas sesuai keinginan pemerintah pusat dimana yang lebih menggunakan DAU secara efisien. Pemerintah daerah dapat menggunakan bantuan untuk kepentingan dan kebutuhan daerah tersebut tanpa diberikan batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. DAU berfungsi sebagai pemerataan fiskal daerah juga merupakan faktor yang paling dominan untuk menolong pertumbuhan ekonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Sebuah studi yang meneliti tentang pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sihombing (2016) menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah dan hal tersebut memberikan hasil bahwa semakin besar DAU maka semakin besar juga Belanja Daerah. Adiputra (2014) melakukan penelitian sejalan mengenai DAU dengan hasil penelitian tersebut yang mengemukakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Rusmita (2016) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh dan bernilai negatif terhadap Belanja Daerah.

H₂ : DAU mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah

Fenomena *Flypaper Effect* pada PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah

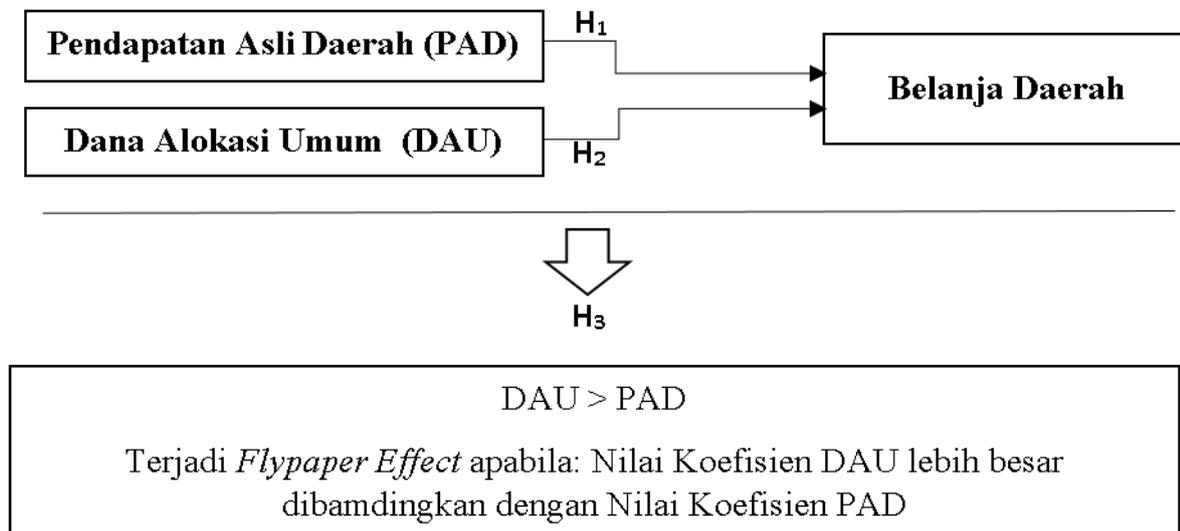
Fenomena *Flypaper Effect* pada PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah dapat dikaitkan dengan teori keagenan. Pada teori keagenan ini terdapat konflik kepentingan yang terjadi dan menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Konflik kepentingan dalam pemerintahan dilihat dari perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam hal ini pemerintah pusat menginginkan agar penggunaan DAU dilakukan secara efektif dan efisien untuk membiayai Belanja Daerah dan mengharapkan peningkatan penerimaan PAD sesuai kebijakan desentralisasi. Sebaliknya, pemerintah daerah menginginkan agar transfer DAU dari pemerintah pusat lebih tinggi ditahun berikutnya sehingga yang terjadi pemerintah daerah meminimalisir penggunaan PAD untuk Belanja Daerah dan lebih menggunakan DAU untuk Belanja Daerahnya. Kondisi ketika pemerintah daerah lebih banyak menggunakan DAU untuk membiayai Belanja Daerahnya dari pada menggunakan PAD disebut dengan fenomena *flypaper effect*.

Amalia (2015) melakukan penelitian mengenai *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan memberikan hasil bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Namun secara simultan pengaruh DAU lebih besar dari pada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, hal tersebut menyatakan telah terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan. Esra Erikson Sihombing dan Anthonius H Citra Wijaya (2016) juga menguji pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah menyatakan bahwa nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD, dengan demikian bahwa telah terjadi *Flypaper Effect*. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Aliferiana Irsyadea Putri dan Haryanto (2019) yang melakukan penelitian mengenai *Flypaper Effect* di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan memberi hasil bahwa telah terjadi fenomena *Flypaper Effect* dimana dalam hal ini pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakannya bergantung pada jumlah DAU dibandingkan PAD. Sedangkan I Made Pradana Adiputra (2014) mengungkapkan bahwa tidak terjadinya *Flypaper Effect* karena koefisien DAU lebih besar dibandingkan PAD. Serupa dengan

penelitian Irham Iskandar (2012) yang mengemukakan bahwa koefisien PAD lebih besar dari *Unconditional Grants* yang menunjukkan tidak terjadinya *Flypaper Effect*.

H₃ : Terjadi fenomena *Flypaper Effect* ditandai dengan pengaruh Koefisien beta DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan pengaruh Koefisien beta PAD terhadap Belanja Daerah

Kerangka Konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

METODE

Objek dalam penelitian yang ditetapkan peneliti yaitu pada Kabupaten/Kota di Bali periode 2010-2018 yang merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD yang terdapat di DJPK Kementerian Keuangan RI pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder yaitu mengolah data yang dikumpulkan dari dokumen pemerintah daerah berupa data kuantitatif, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran APBD DJPK Kementerian Keuangan RI pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis regresi (*simple regression*) untuk menguji Hipotesis 1 dan Hipotesis 2, analisis berganda (*multiple regression*) untuk menguji Hipotesis 3 dan data diolah menggunakan software SPSS.

Ruang lingkup pada penelitian ini yang digunakan yaitu variabel pendapatan asli daerah yang dibatasi menggunakan total pendapatan asli daerah yang terdapat di laporan anggaran pendapatan belanja daerah, variabel dana alokasi umum dibatasi dengan formula yang didapat dari ringkasan aturan penetapan DAU menurut PP No. 5 Tahun 2005, variabel belanja daerah dibatasi menggunakan total pendapatan asli daerah yang terdapat di laporan anggaran pendapatan belanja daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan daerah yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali yaitu berjumlah 9 Kabupaten/Kota. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya, unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat berupa organisasi dalam skala kecil / terbatas.

Penelitian ini menggunakan unit analisis *non-probability sampling* dan pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh (*sensus*), yaitu penentuan sampel menggunakan

semua anggota populasi yang berarti sampel dalam penelitian ini adalah 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan rincian 8 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Bali.

Dari populasi tersebut, dalam pengambilan sampel mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Merepresentatifkan keadaan sebenarnya secara keseluruhan pada Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Bali.
2. Ketersediaan data pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang memiliki informasi keuangan dalam penelitian yang terdiri dari data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah (BD) pada periode tahun 2010-2018.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut pada Tabel 1:

Tabel 1. Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah populasi dan sampel Laporan Keuangan Pemerintah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali ditahun 2010-2018	9
2.	Jumlah tahun penelitian	9
Jumlah observasi keseluruhan (9 x 9)		81

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2020

Variabel Belanja Daerah (BD) pada penelitian ini menggunakan jumlah realisasi Belanja Daerah (BD) Pemerintah Daerah di Provinsi Bali yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2010-2018 menggunakan mata uang satuan Rupiah (Rp) dan pengukuran Belanja Daerah dalam penelitian ini menggunakan Total Belanja Daerah yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran APBD DJPK Kementerian Keuangan RI.

Total Belanja Daerah:

$$\mathbf{BD = BO + BM + BTT + BT}$$

Keterangan:

BD : Belanja Daerah

BO : Belanja Modal

BTT : Belanja Tidak Terduga

BT : Belanja Transfer

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penelitian ini menggunakan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah di Provinsi Bali pada Tahun 2010-2018 dengan satuan mata uang Rupiah (Rp). Pengukuran PAD dalam penelitian ini menggunakan Total PAD yang telah dicantumkan di Laporan Realisasi Anggaran APBD DJPK Kementerian Keuangan RI.

Total PAD:

$$\mathbf{PAD = Hasil Pajak Daerah + Hasil Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Hasil Lain-Lain PAD yang Sah}$$

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) pada penelitian ini menggunakan jumlah realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah di Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2010 hingga 2018 dengan satuan nominal mata uang Rupiah (RP). Pengukuran DAU dalam penelitian ini menggunakan jumlah DAU yang telah dicantumkan di Laporan Realisasi Anggaran APBD DJPK Kementerian Keuangan RI yang besarnya telah diatur dalam PP No. 55 tahun 2005.

Total DAU:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dari data penelitian yang telah di transformasikan dalam bentuk logaritma natural tanpa mengalami seleksi *outlier*. Peneliti mendapatkan informasi mengenai hasil data penelitian yang diperoleh dari hasil data deskripsi tersebut yaitu seperti nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BD	81	26.81	29.39	27.8327	.53179
PAD	81	23.51	29.15	26.1569	1.23163
DAU	81	25.61	27.61	26.9527	.37329
Valid N (listwise)	81				

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

Dari hasil statistik deskriptif diatas, menurut analisis peneliti Tabel 2 menunjukkan bahwa *mean* (rata-rata) dari Belanja Daerah tersebut adalah 27.8327 dengan standar deviasi yang dihasilkan sebesar 0.53179. artinya, rata-rata Belanja Daerah yang menjadi sampel penelitian pada tahun 2010-2018 adalah sebesar 27.8327. Pada tabel tersebut juga menunjukkan skor 26.81 yang berarti merupakan jumlah skor minimum pada Belanja Daerah. Sementara itu untuk skor maksimum tersebut yaitu berjumlah 29.39. *Mean* (rata-rata) dari PAD adalah 26.1569 dengan standar deviasi yang dihasilkan sebesar 1.23163. Skor minimum PAD yang terdapat di tabel tersebut adalah sebesar 23.5. Sedangkan skor maksimal PAD yang terdapat pada tabel tersebut adalah sebesar 29.15. *Mean* (rata-rata) dari DAU tabel tersebut adalah 26.9527 dengan standar deviasi yang dihasilkan sebesar 0.37329. Ini menunjukkan bahwa rata-rata yaitu sebesar 26.9527. Skor minimum yang terdapat di tabel tersebut adalah sebesar 25.61. Sedangkan skor maksimum DAU yang diperoleh dari tabel tersebut adalah 27.61.

Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, data dari tiap variabel tersebut dapat terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini yang digunakan yaitu dengan menggunakan uji *one-sample kolmogorov-smirnov* test. Uji kolmogorov-smirnov merupakan analisis statistik untuk menguji normalitas. Pengujian uji kolmogorov-smirnov dikarenakan seringkali data yang secara visual terlihat normal, namun memiliki hasil yang berbeda dengan uji statistik. Oleh karena itu uji normalitas perlu diuji menggunakan uji kolmogorov-smirnov.

Tabel 3. Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.15867630
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.052
	Negative	-.045
Test Statistic		.052
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

Berdasarkan hasil pengujian uji kolmogorov-smirnov yang telah dilakukan peneliti pada tabel 3 nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* mencapai angka sebesar 0.2 dengan nilai kolmogorov-smirnov 0.052. Peneliti menyimpulkan bahwa data yang di uji telah terbukti dengan terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi 0.2 yang didapat lebih besar dari 0.05.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dan bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi adanya interkorelasi atau hubungan yang kuat antar variabel independen.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas Tolerance & VIF
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.674	1.347		6.440	.000		
	PAD	.399	.015	.924	27.332	.000	1.000	1.000
	DAU	.324	.048	.227	6.728	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

Dari hasil uji multikolinearitas diatas pada tabel 4 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Karena tabel 4 menunjukkan bahwa nilai VIF kedua variabel independen kurang dari 10 yaitu sebesar 1.000 dan nilai *tolerance* lebih dari 0.10 dengan angka sebesar 1.000.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* dengan membandingkan antara angka dari *Durbin-Watson* yang dihasilkan dari pengujian dengan tabel *Durbin-Watson*.

Tabel 5. Uji Autokorelasi *Durbin-Watson*

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.954 ^a	.911	.909	.16070	1.979

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

Durbin-Watson yang dihasilkan yaitu sebesar 1.979. Sedangkan untuk memenuhi kriteria dari hasil uji *Durbin-Watson* tersebut akan dibandingkan dengan tabel *Durbin-Watson*. Angka yang telah diperoleh dalam tabel *Durbin-Watson* yaitu nilai $d_l = 1.5888$, nilai $d_u = 1.6898$ dan nilai $4 - d_u = 2.3102$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam uji yang telah dilakukan dengan *Durbin-Watson* tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual dalam pengamatan heteroskedastisitas atau tidak melalui persamaan model regresi pengamatan ke pengamatan lainnya.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas *Rank Spearman Rho*

		Correlations			
		PAD	DAU	Unstandardized Residual	
Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient	1.000	.264*	-.189
		Sig. (2-tailed)	.	.017	.092
		N	81	81	81
	DAU	Correlation Coefficient	.264*	1.000	.065
		Sig. (2-tailed)	.017	.	.563
		N	81	81	81
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.189	.065	1.000
		Sig. (2-tailed)	.092	.563	.
		N	81	81	81

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020

Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari semua variabel yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, peneliti telah melakukan uji asumsi klasik dimana uji tersebut telah dilakukan sebelumnya dan telah terbebas dari uji asumsi klasik. Rumus dari analisis linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BD = a + b_1PAD + b_2DAU + e$$

Keterangan

- BD : Belanja Daerah
a : konstanta
b₁ : koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah
b₂ : koefisien regresi Dana Alokasi Umum
e : *error*

Tabel 7. Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	8.674	1.347		6.440	.000
	PAD	.399	.015	.924	27.332	.000
	DAU	.324	.048	.227	6.728	.000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

Berdasarkan dari tabel 7 diatas yang telah didapat, maka dapat diketahui model regresi yang dihasilkan antara PAD dan DAU terhadap BD yaitu:

$$BD = 8,674 + 0,399PAD + 0.324DAU + e$$

Uji Hipotesis T

Uji t dalam penelitian ini yang digunakan bertujuan untuk menguji pengaruh antara masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri atau secara parsial terhadap variabel terikatnya yang terdapat pada hasil *output* tabel koefisien regresi. Pengukuran dalam uji t ini yaitu melihat perbandingan antara t_{tabel} dengan t_{hitung} . Dan kemudian terbentuklah hipotesis sebagai berikut:

1. H₁ pada penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Pendapatan asli daerah memiliki nilai $t_{tabel} < t_{hitung} = 1.99085 < 27.332$ dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,00 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 ($0.000 < 0.05$). Sehingga hasil tersebut menunjukkan H₁ diterima dengan pengaruh terhadap variabel yang diuji. Dengan demikian dapat ditarik pernyataan yang mendasar bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
2. H₂ pada penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dana alokasi umum memiliki nilai $t_{tabel} < t_{hitung} = 1.99085 < 6.728$ dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,03 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 ($0.030 < 0.05$). Sehingga hasil tersebut menunjukkan H₂ diterima dengan pengaruh terhadap variabel yang diuji. Dengan demikian dapat ditarik pernyataan yang mendasar bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

3. H_3 pada penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif lebih besar dari dana alokasi umum terhadap belanja daerah yang artinya tidak terjadi *flypaper effect*. Pendapatan asli daerah mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 27.332 sedangkan dana alokasi umum mempunyai t_{hitung} sebesar 6.728 ($PAD > DAU = 27.332 > 6.728$) sehingga hasil tersebut menunjukkan H_3 ditolak dengan pengaruh terhadap tiap variabel yang diuji. Dengan demikian dapat ditarik pernyataan yang mendasar bahwa tidak terjadinya fenomena *flypaper effect* ditandai dengan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah lebih besar dari pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah.

Uji Hipotesis F

Uji F yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel secara simultan atau keseluruhan variabel independen, yaitu: pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap satu variabel dependen yaitu, belanja daerah.

Tabel 8. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.610	2	10.305	399.046	.000 ^b
	Residual	2.014	78	.026		
	Total	22.624	80			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Sumber: Output IBM SPSS 24, data diolah penulis 2020.

Berdasarkan pada tabel 8 diatas, didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 399,046 dengan signifikansi sebesar 0.000. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa nilai tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 ($0,000 < 0.05$) dan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($399,046 < 3,11$). Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Dalam teori keagenan tersirat di dalam hubungan pemerintah daerah yaitu dengan masyarakat. Masyarakat (principal) berkewajiban memberikan sumber daya kepada daerah yaitu berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah (agen) dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, sarana umum dan infrastruktur yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Pendapatan asli daerah merupakan bagian yang berperan sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dan kemampuan daerah melaksanakan keuangan diukur dari besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apabila dalam suatu daerah jumlah pendapatan asli daerah terus meningkat dengan diimbangi pengeluaran daerah yang efisien maka dapat dikatakan daerah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki akan semakin mandiri daerah tersebut dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan semakin kecil pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dalam penelitian ini hasil dari hipotesis 1 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah diterima. Artinya pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah semakin besar pula belanja daerah.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang dibangun penulis bahwa semakin besar pendapatan asli daerah maka akan berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini juga konsisten sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu penelitian Iskandar (2012) dan Aliferiana Irsyadea Putri dan Haryanto (2019) yang menyatakan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula belanja daerah. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil kegiatan pemerintah daerah dalam pemanfaatan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan dipungut berdasarkan peraturan yang telah berlaku. Dengan demikian berkaitan dengan hal tersebut, semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki maka akan semakin besar pula dana pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah dalam mendanai kegiatan atau program yang telah direncanakan pemerintah. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan kecenderungan pemerintah akan menghabiskan dana anggaran yang sudah ditetapkan untuk lebih menggali potensi yang dimiliki.

Pada Gambar 1 ringkasan APBD provinsi Bali tahun 2010-2018 menunjukkan bahwa pendapatan yang terdapat di provinsi Bali terus mengalami peningkatan seiring dengan belanja yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh terhadap peningkatan belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Teori keagenan dalam sebuah riset penganggaran publik yang dimana merupakan contoh penerapan hubungan pendelegasian antara pemerintah pusat (principal) dan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya berupa kekayaan sumber daya daerah yang dimiliki dalam kerangka desentralisasi dan sepenuhnya diserahkan oleh pemerintah daerah. Untuk mengelola sumber daya daerah yang dimiliki, maka pemerintah daerah membutuhkan dana anggaran dari pemerintah pusat untuk mengelola sumber daya potensial dalam bentuk transfer dana dari pemerintah pusat yaitu dana alokasi umum. Dalam mengelola keuangan daerahnya, pemerintah daerah menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai belanja untuk pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk menunjang laju perekonomian di daerah. Apabila dalam transfer dana dari pemerintah pusat tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan daerahnya, maka daerah tersebut akan sulit untuk melakukan pembangunan di daerahnya untuk berkembang. Dan jika transfer dana dari pemerintah pusat tinggi, maka pemerintah daerah akan menggunakannya untuk membelanjakan kebutuhan daerah dan semakin meningkatkan pembangunan pada daerah tersebut.

Selain itu dana alokasi umum juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan celah fiskal yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah. Karena jika pemerintah daerah ingin membelanjakan dana untuk kebutuhan daerah dan melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah butuh sumber dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran tersebut, apabila pada daerah yang mempunyai pendapatan yang kecil daerah tersebut akan sangat sulit membiayai kebutuhannya tersebut. Maka dari itu pemerintah daerah membutuhkan dana suntikan dari pemerintah pusat untuk membelanjakan dana tersebut untuk kebutuhannya agar tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi dapat tercapai dengan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini hasil dari hipotesis 2 menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah diterima. Artinya dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar dana alokasi umum akan semakin besar pula belanja daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan penulis menyatakan bahwa semakin besar dana alokasi umum yang diperoleh maka akan berpengaruh terhadap belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hasil yang telah diteliti dari penelitian ini sejalan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiputra (2014) dan Erikson (2016) yang menyatakan semakin besar dana alokasi umum maka akan semakin besar pula belanja daerah.

Dengan demikian dari hasil penelitian ini, terdapat kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan dana alokasi umum sebagai anggaran yang akan dipakai dengan menggali potensi-

potensi daerahnya dengan harapan daerah tersebut agar menjadi daerah yang secara mandiri menggunakan potensinya secara efektif dan tidak bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk membangun dan mengelola daerahnya.

***Flypaper Effect* Pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah**

Dalam teori keagenan, *flypaper effect* terdapat pada konflik kepentingan yang terjadi dan menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Konflik kepentingan dalam pemerintahan dilihat dari perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat (principal) dan pemerintah daerah (agen) yang dalam hal ini pemerintah pusat menginginkan agar penggunaan dana alokasi umum dilakukan secara efektif dan efisien untuk membiayai Belanja Daerah dan mengharapkan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai kebijakan desentralisasi. Sebaliknya, pemerintah daerah menginginkan agar transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat lebih tinggi ditahun berikutnya sehingga yang terjadi pemerintah daerah meminimalisir penggunaan pendapatan asli daerah untuk belanja daerah dan lebih menggunakan dana alokasi umum untuk belanja daerahnya.

Selain itu penyebab dari hal ini juga disebabkan oleh faktor dari kebijakan atas pemberian dana alokasi umum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang didasarkan pada kemampuan fiskal masing-masing daerah yaitu daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah yang akan memperoleh jumlah dana alokasi umum yang cukup besar, sebaliknya daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang tinggi akan memperoleh jumlah dana alokasi umum yang relatif kecil. Selain itu dengan kemampuan fiskal yang rendah pemerintah daerah secara mandiri belum bisa membiayai pengeluaran daerahnya sendiri dan untuk mendukung perkembangan daerahnya, pemerintah daerah membutuhkan dana alokasi umum yang berupa bantuan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum maka akan semakin besar pula belanja daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan alokasi umum secara simultan dan parsial mempengaruhi belanja daerah. Selain itu terdapat peningkatan pendapatan asli daerah dan alokasi umum yang akan memberikan pengaruh terhadap belanja daerah. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam hal ini pendapatan asli daerah memiliki kecenderungan dominan dalam membiayai belanja daerah.

Berdasarkan hasil yang didapat dari pengujian regresi linear berganda pada tabel 7 telah membuktikan bahwa tidak terjadinya fenomena *flypaper effect* dikarenakan sesuai syarat terjadinya *flypaper effect* yaitu apabila koefisien beta dana alokasi umum lebih besar daripada koefisien beta pendapatan asli daerah ($DAU > PAD$) dan keduanya signifikan. Namun pada penelitian ini menyatakan bahwa koefisien beta pendapatan asli daerah lebih besar dari pada dana alokasi umum ($PAD > DAU$) yang berarti tidak terjadi fenomena *flypaper effect*. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis 3 yang telah dirumuskan dimana telah terjadi fenomena *flypaper effect*.

Hasil dari penelitian ini memberikan pembuktian bahwa semakin besar pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum maka akan semakin besar pula belanja daerah. Hasil ini sesuai dengan yang ditunjukkan pada Gambar 1 bahwa peningkatan belanja daerah diiringi dengan besarnya jumlah pendapatan daerah pada tahun 2010-2018. Namun hal ini bertolak belakang dengan fakta yang ditunjukkan pada Gambar 2 bahwa belanja daerah didominasi oleh dana alokasi umum sebesar 51% sedangkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sebesar 49%, dalam hal ini dana alokasi umum memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah. Penyebab dari ketidaksesuaian dari data tersebut pada Gambar 1 adalah karena data tersebut hanya mewakili data dari jumlah total keseluruhan PAD dan DAU tiap tahun di Provinsi Bali dan hanya menguji data secara keseluruhan di Provinsi Bali. Dimana seharusnya pengujian dilakukan dengan menguji tiap Kabupaten/Kota per tahunnya untuk melihat daerah mana saja yang terjadi fenomena *flypaper effect* dan melihat fenomena *flypaper effect* dari daerah yang kaya dan miskin atau dengan pendapatan asli daerah yang tertinggi dan terendah sehingga pengujian fenomena *flypaper effect* dapat secara spesifik menjelaskan fakta tersebut. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Made Pradana Adiputra (2014) dan Irham Iskandar (2012) yang menyatakan tidak terjadi fenomena *Flypaper Effect*.

Dengan demikian, fenomena *flypaper effect* ini dapat dikatakan bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap belanja daerah dibandingkan dengan pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Dengan kata lain, pemerintah di Provinsi Bali telah mandiri dalam segi keuangannya karena telah mampu bertumpu pada sumber-sumber dan potensi yang dimiliki dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan posisi yang strategis serta kaya akan sumber daya alam yang menjanjikan sumber-sumber penerimaan yang besar seperti pajak dan retribusi daerah maupun pemanfaatan sumber daya alam dari sektor wisata dan pertanian yang paling mendominasi akan penerimaan yang diperoleh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menjawab rumusan masalah dengan meneliti dan mengetahui apakah terjadi fenomena *Flypaper Effect* yang berhubungan dengan variable independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap variable dependen yaitu Belanja Daerah. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka terdapat beberapa simpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2010-2018. Hal tersebut disebabkan karena sumber-sumber dana penerimaan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pemanfaatan potensi yang dimiliki di daerah dan mengoptimalkan potensi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menunjang penerimaan daerah sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2010-2018. Hal tersebut disebabkan oleh pemerintah daerah yang lebih terdorong untuk meningkatkan Belanja Daerah seiring dengan peningkatan Dana Alokasi Umum yang merupakan pendapatan daerah. Selain itu, hal ini juga disebabkan terdapat kecenderungan pemerintah daerah untuk Belanja menggunakan dana anggaran daerah karena faktor kebijakan sesuai aturan yang berlaku atas pemberian Dana Alokasi Umum yang diterapkan
3. Tidak terjadinya fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2010-2018. Terjadinya fenomena *Flypaper Effect* diikuti oleh Belanja Daerah berdasarkan dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu secara mandiri karena pendapatan aslinya mampu menutupi pengeluaran daerahnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kesiapan fiskal pemerintah daerah tergolong cukup mampu sehingga terjadi respon terhadap DAU yang rendah dan menunjukkan pemerintah daerah sudah mengoptimalkan sumber-sumber yang menjadi potensi Pendapatan Asli Daerahnya

Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terdapat rekomendasi bagi peneliti selanjutnya agar dapat memberikan penelitian yang baik bagi peneliti selanjutnya. Berikut rekomendasi dari peneliti yang diberikan yaitu:

1. Data yang digunakan untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sumber data yang bersumber dari lembaga yang menangani laporan keuangan secara mendalam seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), sehingga data yang dimiliki semakin komprehensif dan akurat dalam menyampaikan informasi mengenai variabel yang diteliti dan sesuai dengan periode tahun penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan Kabupaten/Kota di luar provinsi Bali dan kemudian membandingkan keduanya, sehingga semakin banyak diketahui daerah mana saja yang sudah mandiri ataupun yang belum mandiri agar kemungkinan ke depan lebih banyak temuan analisis yang lebih bervariasi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi Belanja Daerah seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal,

Pertumbuhan Ekonomi, *Intergovernmental Revenue*, variabel lainnya yang berkaitan dengan Belanja Daerah agar hasil yang didapat lebih sempurna, atau juga bisa menambahkan variabel *intervening* dan *moderating*.

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat diharapkan melakukan pengujian fenomena *flypaper effect* dengan beberapa pengujian, yaitu pengujian *flypaper effect* di tiap Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, *flypaper effect* di daerah dengan pendapatan asli daerah tertinggi dan terendah, dan *flypaper effect* pada prediksi belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I Made. “*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Karangasem” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH* Volume 3 No. 2. 2014
- Afrizawati. “Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan” *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)* Vol 2 No. 1. 2012
- Amalia, Wia Rizqi. “*Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 15 No. 1:1-12. 2015
- Ansori, Wakhid. “Fenomena *Flypaper Effect* atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Pulau Bali Dan Nusra” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 18 No. 2: 151-163. 20
- Asdeksi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. (*Online*) <http://www.asdeksi.org/asdek03/2011/05/30/permendagri-nomor-21-tahun-2011/>. Diakses: 21 Januari 2020
- Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota Se-Provinsi Bali 2010-2014. (*Online*) <https://bali.bps.go.id/publication>. Diakses: 21 Januari 2020
- Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota Se-Provinsi Bali 2014-2018. (*Online*) <https://bali.bps.go.id/publication>. Diakses: 21 Januari 2020
- Bali Post. 2019. Ekonomi Bali Tumbuh Tinggi Hanya Prediksi (*Online*). <http://www.balipost.com/news/2019/12/26/96192/Ekonomi-Bali-TumbuhTinggi-Hanya-Prediksi.html>. Diakses pada 23 Agustus 2020
- Bali Puspa News. 2017. DAU Dinamis, Dewan Minta Pemprov Hati-Hati Susun Anggaran (*Online*). <http://www.balipuspanews.com/dau-dinamis-dewan-minta-pemrprov-hati-hati-susun-anggaran.html>. Diakses pada 23 Agustus 2020
- Bappenas. 2009. https://www.bappenas.go.id/files/6913/6082/9897/bag-v-74-75-cek_20090130070903__21.doc
- Deddi Nordiawan. Anggaran Disuatu Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. 2012
- DJPK Depkeu. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 (*Online*). <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>. Diakses: 21 Januari 2020
- DJPK Depkeu. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005. (*Online*) http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-55-tahun-2005-tentang-dana-perimbangan/--233-268-PP55_2005.pdf. Diakses: 21 Januari 2020
- DJPK Kemenkeu. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (*Online*) <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=367>. Diakses: 21 Januari 2020
- Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Undip. 2001
- Gorodnichenko. *Effects of Intergovernmental Transfer and the Flypaper effect in Turkey*. Turquoise Studies. 2011
- Grace. Informasi Umum Tentang Bali Dan Sejarah Tentang Bali. (*Online*) <https://www.gotravelaindonesia.com/informasi-umum-tentang-bali/>. Diakses: 14 Desember 2019

- Halim, Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. 2008
- Halim, Abdul. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. 2002
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah" *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol 2 No. 1: 53-64. 2006
- Haryanto dan Aliferiana Irsyadhea Putri. "*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah" *ISSN* Vol 8 No. 2 Hal: 1-15 2019
- Hasan, Iqbal. Pokok-Pokok Materi Statistik 1. Jakarta: Bumi Aksara. 1999
- Iskandar, Irham. "*Flypaper Effect* pada *Unconditional Grant*" *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 13 No. 1:113-131. 2012
- Kanalbali/KR3, Kumparan. 2018. PAD Buleleng Paling Tumbuh, Badung Tetap Paling Besar. (*Online*). www.kumparan.com/amp/kanalbali/pad-buleleng-paling-tumbuh-badung-tetap-paling-besar. Diakses pada 23 Agustus 2020.
- Kepala BPS Provinsi Bali. 2019. Pertanian dalam Perekonomian Bali (*Online*). <http://www.balipost.com/news/2019/04/09/72598/Pertanian-dalam-Perekonomian-Bali.html>. Diakses pada 23 Agustus 2020
- KS, Ishak dkk. "*Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kota Parepare" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 2 No. 2. 2019
- Ksap. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005. (*Online*) <http://www.ksap.org/standar/PSAP02.pdf>. Diakses: 21 Januari 2020
- Kuncoro, H. "Fenomena *Flypaper Effect* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia" *Simposium Nasional Akuntansi X*. 2007
- Kuncoro, H. "Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets* [Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang], 9(1), 47–63. 2004
- Liputan 6. 2019. Bappenas: Penggunaan Dana Alokasi umum Harus Tepat Sasaran (*Online*). <http://www.liputan6.com/bisnis/read/4035965/bappenas-penggunaan-dana-alokasi-umum-harus-tepat-sasaran>. Diakses pada 23 Agustus 2020
- Maimunah, Mutiara. "*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera" *Simposium Nasional Akuntansi Padang* (9). 2006
- Mangkuwinata, Sony Muhammad Ikhsan. "Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bireuen" *Jurnal Kebangsaan* Vol 3 No. 6. 2014
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2002
- Muhidin, Sambas Ali dan Maman Abdurahman. Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009
- Mentayani, Ida dkk. "*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kota dan Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan" *Jurnal Spread* Vol 2 No. 1. 2012
- Melo, Ligia. "*Flypaper Effect Under Different Institutional Context: The Colombian Case*" *Kluwer Academic Publishers Public Choice* 111: 317–345. 2002
- Mulya, Rahmatul dan Bustaman. "Pengaruh *Flypaper Effect* pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 1 No. 2:190-198. 2016
- Mustofa, Ali. 2018. PAD Bali Rp 3 Triliun Lebih, Pajak Kendaraan Penyumbang Tertinggi. (*Online*). <http://www.radarbali.jawapos.com/read/2018/02/01/45584/pad-bali-rp-3-triliun-lebih-pajak-kendaraan-penyumbang-tertinggi>. Diakses pada 23 Agustus 2020
- Mustofa, Ali. 2019. Sektor Pertanian Jadi Andalan, Sumbang 30% Pendapatan Warga. (*Online*). <http://www.radarbali.jawapos.com/read/2019/02/10/118634/sektor-pertanian-jadi-andalan-sumbangan-30-persen-pendapatan-warga>. Diakses pada 23 Agustus 2020
- Pramuka, Bambang Agus. "*Flypaper Effect* pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Jawa" *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 11 No 1:1-12. 2010

- Pur. 2020. Fokus Utama Pembangunan Bali Gairahkan Ekonomi Kerakyatan. <http://bisnisbali.com/index.php/2020/01/04/fokus-utama-pembangunan-bali-gairahkan-ekonomi-kerakyatan/>. Diakses: 1 Maret 2020
- Rusmita, Sari. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat" *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol 5 No. 3:237-257. 2016
- Salindeho, Claudia. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara" *Jurnal EMBA* Vol 4 No. 3:705-716. 2016
- Sihombing, Esra Erikson dan Anthonius. "*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Papua" *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* Vol 11 No. 1: 29-37. 2016
- Sujarweni, V Wiratna. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2016
- Sukmana, Yoga. 2017. Tahan Bantingnya Ekonomi Indonesia Dalam 10 Tahun Terakhir di Mata Sri Mulyani. (Online). <http://www.money.kompas.com/read/2017/03/27/132515826/tahan.bantingnya.ekonomi.indonesia.dalam.10.tahun.terakhir.di.mata.sri.mulyani>. Diakses pada 23 Agustus 2020
- Valenta Elisa. 2019. Daerah yang Paling Mandiri di Indonesia (Online). <http://www.beritagar.id/artikel-amp/berita/daerah-yang-paling-mandiri-di-indonesia>. Diakses pada 23 Agustus 2020
- Venter, Denis. "*Multiparty Democracy And Politics In Africa*" *Eastern Africa Social Science Reserch Review (EASSRR)*. Vol. XIX, no.1. 2007
- Wahyuni, Susanti Eka dan Indrian Supheni. "*Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk" *Akuntansi Dewantara* Vol 1 No 2. 2017
- Winata, Nyoman. 2020. Digempur Pembangunan Infrastruktur, Bali Dalam Kuasa Jakarta. (Online) <http://www.balipost.com/news/2020/01/25/100525/Digempur-Pembangunan-Infrastruktur,Bali-Dalam.html>. Diakses: 1 Maret 2020
- <https://bali.tribunnews.com/2015/04/01/wow-ini-sumber-pad-tertinggi-di-kabupaten-badung>.